

ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA BLITAR DENGAN PENDEKATAN KOMUNIKASI POLITIK DAN BUDAYA POLITIK

Irtanto

Peneliti Madya bidang politik dan pemerintahan pada Balitbang Provinsi Jawa Timur
(Makalah diterima 1 Maret 2011 - Revisi 12 April 2011)

Abstrak

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi partisipasi politik dan mengetahui efektivitas sosialisasi dalam pemilihan Walikota Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi politik ada beberapa hal, antara lain: 1). faktor budaya politik partisipan, budaya politik partisipan tersebut disebabkan oleh karena kepercayaan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kota Blitar dipandang baik selama lima tahun terakhir terutama pada masa pemerintahan Djarot Syaiful Hidayat. 2) faktor pelayanan publik yang selama ini dapat memberikan pelayanan yang baik dan dapat memberikan kepuasan pada rakyat. 3). faktor persepsi rakyat terhadap kondisi kebebasan berpolitik di Blitar saat ini ikut mewarnai partisipasi mereka pada pemilihan walikota Blitar.

Partisipan cukup tinggi pada pemilihan walikota Blitar disebabkan pula karena faktor strategi komunikasi terutama sosialisasi yang diterapkan oleh KPUD cukup efektif. Media televisi lokal (JTV, KSTV, dan Televisi Rajawali), Radio Mayangkara, Persada, Mahardika dan Radio Patria dan surat kabar Jawa Pos, Surya, Memorandum, Bhirawa dan Time Dor, serta media lainnya cukup efektif dalam menjalankan peran sosialisasi pemilihan walikota Blitar.

Kata Kunci: pemilihan walikota, partisipasi politik, sosialisasi politik.

Abstract

Research with a quantitative approach aims to identify factors that influence political participation and the effectiveness of socialization in Blitar Mayor election. The results showed that the factors that influence political participation there are a few things, among others: 1). participant political culture, political culture partisipasipan was due because the trust of the people of Blitar City Governance is seen both during the last five years primarily on the mass administration Djarot Syaiful Hidayat. 2) factors of public service which can provide good service and to give satisfaction to the people. 3). people's perception of the condition factor of political freedoms in Blitar is also adds to their participation in the mayoral election Blitar.

Participants high in Blitar mayoral election is also caused due to socialization factors, especially the communication strategy adopted by the Election Commission is effective. Local television media (JTV, KSTV, and the Rajawali Television), Radio Mayangkara, Persada, Mahardika and Radio Patria and Jawa Pos newspaper, Surya, Memorandum, Bhirawa and Time Dor, and other media is quite effective in performing the role of socialization Blitar mayoral election.

Keywords: election of mayors, political participation, political socialization.

PENDAHULUAN

Tingkat partisipasi politik warga negara dapat diduga dipengaruhi oleh sejauhmana

peran media sosialisasi seperti media massa, lembaga-lembaga yang berwenang dan budaya politik serta faktor kepercayaan kepada kinerja pemerintah. Selain itu

kehadiran pemilih dipengaruhi pula oleh sejauhmana pilkada/pilwali menawarkan format partisipasi publik yang lebih baik. Fenomena golput adalah suara protes rakyat yang tidak lagi mampu bersuara. Golput bisa mendorong lahirnya sikap pembangkangan dan tindak anarki jika elite politik serta penyelenggara negara tidak lagi memerhatikan mereka. Sebagai gambaran bahwa tidak semua pilkada dihadiri oleh semua warga negara dan adanya kecenderungan golput terjadi dimana-mana yang jumlahnya relatif tinggi, seperti pilwali Kota Surabaya tahun 2005 tingkat partisipasinya sebesar 51,79%, pemilihan bupati Sidoarjo pada tahun yang sama tingkat kehadirannya 63,79%, pemilihan Walikota Blitar 2005 mereka yang berpartisipasi politik sebesar 74,40%, dan pemilihan Walikota Pasuruan tingkat partisipasinya sebesar 70,56% (Kompas, 16 Pebruari 2008).

Di Jawa Timur, partisipasi politik pemilih pada pemilihan walikota memiliki kecenderungan yang variatif, artinya antar daerah mengalami perbedaan tingkat partisipasinya. Dari 24 pemilihan kepala daerah langsung yang digelar sejak tahun 2005 sampai Januari 2008, hampir 70% diantaranya mengalami penurunan partisipasi pemilih. Hal ini berarti ada kecenderungan kuat bahwa mereka yang golput semakin besar pada setiap pelaksanaan pilkada. Seperti Pilkada Kota Surabaya tercatat sebagai Pilkada yang paling rendah tingkat partisipasi pemilihnya, yaitu hanya 51,70 persen. Sebaliknya, sukses kenaikan tingkat partisipasi pemilih justru terjadi di pemilihan kepala daerah Kabupaten Sampang dengan angka partisipasi mencapai 75 persen atau naik 23 persen dibandingkan dengan partisipasi pemilih di Pemilu 2004 (Wahyu Yohan, Kompas, 2008:hal D).

Relasi budaya lokal dengan demokrasi cukup menarik diamati di Kota Blitar. Meskipun kawasan tersebut berada dalam lanskap budaya mataraman yang sering dianggap kurang demokratis, realitas politik menunjukkan bahwa Blitar berbeda dengan daerah lain di wilayah Mataram. Baik level suprastruktur politik maupun infrastruktur politik di Blitar cenderung memiliki

fenomena nilai-nilai demokrasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, misalnya, Pemerintah Kota Blitar telah melakukan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan melalui reformasi birokrasi (Siti Zuhro, 2009:45). Kondisi budaya lokal maupun birokrasi pemerintahan, paling tidak akan memengaruhi partisipasi politik pemilih.

Salah satu pelaksanaan pilkada yang banyak mendapat sorotan adalah pemilihan Walikota Surabaya karena angka golputnya tinggi. Pilkada pertama di Kota Surabaya dilaksanakan 27 Juni 2005. Jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT sebanyak 1.934.228 pemilih dengan 4.872 TPS. Menurut Kacung Marijan (dalam Siti Zuhro, 2009:51) angka golput dalam Pilkada Surabaya mencapai 48,32% atau 934.794 pemilih. Menurut Abror (dalam Siti Zuhro, 2009:50) menyebutkan rendahnya partisipasi itu karena Surabaya pada umumnya sangat rasional dalam menentukan sikap politiknya. Mereka tidak mudah dibujuk dengan janji-janji para kandidat yang disampaikan melalui kampanye. Berbeda dengan Pilkada Surabaya yang tingkat partisipasi masyarakatnya tidak maksimal, Pilkada Kota Blitar dilaksanakan 3 Juli 2005 partisipasi publik cukup tinggi. Menurut Ketua KPUD Kota Blitar, Andreas (dalam Siti Zuhro, 2009:52) masyarakat yang tercatat dalam DPT hampir semuanya menggunakan hak pilihnya, kecuali sebagian kecil saja karena terkendala alasan teknis, seperti bepergian ke luar daerah, tidak dapat meninggalkan pekerjaan di luar kota atau berstatus sebagai TKW/TKI di luar negeri. Tingginya partisipasi politik di Kota Blitar ditunjukkan pula pada pemilu presiden tahun 2009 mencapai 75,9%. Sedangkan pemilihan Walikota Blitar 27 Mei 2010 jumlah pemilih sebanyak 101.608 orang.

Pada masa sebelum lahirnya UU No 32 tahun 2004 sosialisasi pemilu lokal tidak diperlukan karena yang memilih kepala daerah saat itu adalah sekelompok elit politik yang namanya legislatif. Baru berlakunya UU No 32 tahun 2004 pilkada langsung oleh rakyat diperlukan peran lembaga sosialisasi. Oleh karena itu lembaga-lembaga politik seperti KPUD sebagai lembaga politik yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai

tanggung jawab yang cukup besar dalam menyukseskan pilkada tentunya membuat strategi untuk menyosialisasikan tahapan-tahapan dalam pemilihan walikota tersebut.

Permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) faktor apa saja yang memengaruhi partisipasi politik pada pemilihan Walikota Blitar?. (2) sejauhmana efektivitas sosialisasi dalam pemilihan Walikota Blitar?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui faktor yang memengaruhi partisipasi politik pada pemilihan Walikota Blitar; (2) Mengetahui efektivitas sosialisasi dalam pemilihan Walikota Blitar

LANDASAN KONSEP

Faktor Pendorong Partisipasi Politik

Kesadaran Politik & Kepercayaan Pada Pemerintah

Tinggi rendahnya partisipasi warga negara yang ikut serta dalam proses politik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sedangkan yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah: apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak (Surbakti, 1992:144).

Kedua faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya partisipasi politik tersebut di atas, kemudian Paige (dalam Kamarudin, 2003:95) membagi empat tipe partisipasi politik. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). Tipe partisipasi ketiga berupa militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi

maka partisipasi ini disebut pasif.

Kedua faktor di atas bukan merupakan faktor yang berdiri sendiri (bukan variabel independen). Tingkat partisipasi warga negara dalam aktivitas politik juga dipengaruhi oleh motivasi yang dimilikinya. Dorongan-dorongan positif yang mengantarkan seseorang kepada aktivitas politik dapat berwujud melalui : 1. Media-media komunikasi politik, seperti membaca koran dan diskusi-diskusi informal. 2. Propaganda politik dan berbagai upaya untuk mengubah orientasi, terkadang mendorong masyarakat untuk ikut tenggelam dalam partisipasi tersebut. 3. Perasaan individu bahwa partisipasi politik itu suatu keharusan, lalu tumbuhlah kecenderungan kepada politik. 4. Partisipasi politik juga tergantung kepada tingkat kemampuan dan kecakapan yang dimiliki individu. 5. Keyakinan individu akan kemampuannya dalam memengaruhi keputusan-keputusan pemerintah merupakan dorongan psikologis untuk berpartisipasi (Sa'ad dalam Ruslan, 2000:102-103).

Partisipasi politik menurut Weber (dalam Rush dan Althoff, 2000:181) dapat dilakukan atas dorongan-dorongan yang ada pada seseorang yang didasari oleh motif-motif sebagai berikut: 1. Didasarkan pada penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok. 2. Efektual dan emosional, didasarkan atas kebencian atau *enthousiasme* terhadap suatu ide, organisasi, atau individu. 3. Tradisional, didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu dari suatu kelompok sosial. 4. Rasional bertujuan, didasarkan atas keuntungan pribadi. Menurut Huntington dan Nelson (1994:22) sebab-sebab seseorang menggunakan bentuk-bentuk partisipasi politiknya adalah sebagai motivasi yang ada pada kelompoknya dan dirinya, tentang bagaimana caranya agar tujuannya tercapai melalui saluran-saluran politik yang ada.

Komunikasi & Budaya Politik

Manufi (dalam Ruslan, 2002:74) mendefinisikan sosialisasi politik sebagai kegiatan yang dengan melakukannya orang akan memperoleh berbagai pengalaman,

pengetahuan, nilai, orientasi, dan kesiapan untuk ikut berpartisipasi dengan-tingkat aktivitas yang berbeda-beda sebagai anggota dalam sebuah komunitas sosial atau masyarakat. Menurut Greinstein (dalam Ruslan, 2000:75) bahwa sosialisasi politik adalah “instruksi formal maupun non formal, terencana maupun tidak terencana, akan berbagai pengetahuan, nilai, dan perilaku politik, serta karakter kepribadian yang mempunyai muatan politik. Itu terjadi pada setiap periode kehidupan melalui lembaga-lembaga politik dan sosial yang ada di tengah masyarakat. Eric Rome (dalam Ruslan, 2000:75) berpendapat bahwa sosialisasi adalah kegiatan yang di dalamnya terjadi transformasi berbagai nilai, keyakinan, dan perasaan, yang membentuk kultur politik dengan baik dari generasi ke generasi. Dimulai sejak usia dini dan terus-menerus berlangsung sepanjang hidup. Sementara keluarga, sekolah, gereja, kelompok-kelompok kerja, dan partai-partai politik merupakan agen-agen demi terciptanya proses tersebut.

Sosialisasi politik sebagai kegiatan yang bertujuan membentuk kepribadian politik dalam arti bahwa seseorang memperoleh orientasi politik yang memiliki tiga unsur: nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan mendasar, pengetahuan dan informasi serta perspektif-perspektif politik, serta perasaan dan emosi berikut orientasi-orientasi politik. Partisipasi aktif warga negara dalam bidang politik menyaratkan adanya sosialisasi politik yang harus dialami oleh setiap individu. Karena tanpa adanya sosialisasi politik tidak akan mengakibatkan terjadinya partisipasi politik (Rush dan Althoff, 2000:19). Pengalaman yang diperoleh melalui sosialisasi politik akan menyiptakan perilaku dan orientasi individu dalam aktivitas politik, di samping menentukan sejauh mana partisipasi politiknya.

Rendahnya kualitas partisipasi warga negara juga disebabkan oleh rendahnya intensitas sosialisasi politik. Sosialisasi politik yang rendah menyebabkan rendahnya pemahaman politik yang mereka miliki. Rendahnya intensitas sosialisasi tersebut dapat disebabkan oleh budaya (politik

maupun non politik) yang tidak menguntungkan mereka.

Tidak kalah pentingnya bagaimana strategi komunikasi yang termasuk di dalamnya adalah sosialisasi agar mereka mau berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Bagaimana strategi KPUD dalam menyosialisasikan programnya untuk menyukseskan kehadiran pemilih dalam Pilkada, salah satu strategi yang dapat memengaruhi pemilih adalah daya tarik.

Ketertarikan seseorang terhadap sesuatu tergantung pula sejauhmana efektivitas komunikasi yang dilakukan, apakah sudah memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Nimmo (1989:vi-vii) menyebutkan cakupan komunikasi politik yang terdiri dari komunikator politik, pesan politik, persuasi politik, media komunikasi politik, khalayak komunikasi politik, dan akibat-akibat komunikasi politik. Sedangkan menurut Harold D.Laswell (dalam Sasa Djuarsa Sendjaja, dkk, 1996:60) persoalan komunikasi menyangkut 5 (lima) yaitu *who/* (siapa), *says what?* (mengatakan apa), *in which channel* (melalui saluran apa), *to whom* (kepada siapa), *with what effect* (dengan akibat apa).

Efektivitas sosialisasi diperkirakan akan dipengaruhi pula oleh budaya politik masing-masing pemilihnya. Pada gilirannya budaya politik tersebut akan memengaruhi tingkat kehadiran dalam Pilkada. Dikemukakan pula oleh Almond dan Verba (dalam Sastroatmodjo, 1995:48-50) bahwa budaya politik terbagi menjadi tiga bagian yaitu: 1. Budaya politik parokial. Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil sehingga pelaku-pelaku politik belum memiliki pengkhususan tugas tetapi peran yang satu dilakukan dengan peran yang lain baik di bidang sosial, ekonomi, maupun keagamaan. 2. Budaya politik subyek. Dalam budaya politik subyek masyarakat menyadari adanya otoritas pemerintah, keputusan pejabat bersifat mutlak, tidak dapat diubah, dikoreksi, apalagi ditentang. Bagi mereka yang prinsip adalah mematuhi, menerima, setia, dan loyal kepada pemimpin. 3. Budaya politik

partisipan. Masyarakat dalam budaya politik partisipan memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan untuk sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur, proses politik, dan administratif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah peran komunikasi politik dan budaya politik dalam Pemilihan Walikota Blitar.

Lokasi penelitian adalah Kota Blitar. Dengan jumlah kecamatan yang hanya 3 (tiga) buah, akan menjamin validitas, reliabilitas penelitian dan memudahkan pula dalam menentukan jumlah sampel yang diambil. Jumlah sampel masing-masing kecamatan sebanyak 200 responden sehingga jumlah sampel seluruhnya sebanyak 600 responden. Informasi dan data tentang partisipasi politik masyarakat di Kota Blitar ini diperoleh dari dua sumber, yaitu: *Pertama*, data primer, yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan dan subyek penelitian di lapangan. Informan dalam penelitian ini adalah : 1. Tokoh parpol pengusung calon Walikota Blitar, masing parpol pengusung. Tokoh partai politik diambil untuk mengetahui strategi komunikasi yang ditempuh untuk mengusulkan calonnya. 2. Ketua dan anggota KPUD Kota Blitar. Sedangkan ketua dan anggota KPUD ini diambil sebagai informan diperlukan untuk mengetahui strategi komunikasi terutama tentang sosialisasi yang ditempuh dan hambatan-hambatannya yang terjadi selama ini dalam pelaksanaan Pilkada. 3. Warga masyarakat yang dijadikan responden mempunyai hak memilih sebanyak 600 orang yang mewakili 3 kecamatan. *Kedua*, data skunder, yaitu berupa dokumen tentang hasil pilkada, buku-buku, artikel-artikel, karya ilmiah dan jurnal ilmiah.

Tehnik pengumpulan data, antara lain : 1. *Library research*, yaitu suatu penelitian dengan cara mengumpulkan berbagai bahan bacaan atau literatur, dokumen serta media

massa yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian; 2. *Field work research*, yaitu mengumpulkan data dari penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Untuk mempermudah penelitian di lapangan, perlu ditentukan teknik pengumpulan data agar yang dihimpun dapat efektif dan efisien; 3. Kuesioner melalui *interview*. Adapun bentuk wawancara yang dipergunakan dalam penelitian berpedoman pada kuesioner yang berstruktur dan terbuka yang memuat pertanyaan secara cermat dan terperinci dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Pemilihan Walikota Blitar

Hasil penghitungan suara total KPUD Kota Blitar dari ke lima (5) pasangan calon Walikota Blitar yaitu pasangan Endro Hermono dan Azhar Anwar; Muh. Samanhudi Anwar dan Purnawan Buchori; Anang Triono dan Bambang Gunawan; HM. Zainuddin dan Masrukin; dan pasangan Heru Sunaryanta, dan Sholih Mu'adi terlihat dari masing-masing calon memperoleh kekuatan dukungan dalam pemilihan walikota tersebut. Datanya seperti terlihat pada tabel 1.

Responden penelitian sebanyak 600 orang yang mewakili pemilih di tiga kecamatan, masing-masing kecamatan diambil sebanyak 200 orang. Dari 600 responden tersebut dapat dikelompokkan kedalam usia muda yaitu 15-40 sebanyak 78,0 dan mereka yang usianya dalam golongan tua antara 41-80 tahun sebanyak 22,0%. Dari 600 responden tersebut yang berjenis kelamin laki-laki 59,3% dan perempuan sebanyak 40,7%.

Mereka yang aktif diorganisasi dapat dibagi ke dalam organisasi LSM 11,25%, partai politik sebanyak 5,0%, dalam lingkup organisasi RT 7,5%, lingkup RW sebanyak 8,8%, PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) 13,8% dan organisasi yang lainnya seperti kemahasiswaan dan lain sebagainya 53,8%.

Tabel 1
Rekapitulasi Perolehan Total Suara Pasangan Calon

A	Suara Sah Pasangan Calon	Kecamatan			Jumlah
		Sukorejo	Kepanjen kidul	Sanan wetan	
1	H.Endro Hermono dan Azhar Anwar	1.966	2.137	3.265	7.368 (9,75%)
2	Muh.Samanhudi Anwar, dan Purnawan Buchori	12.469	9.216	10.309	31.994 (42,36%)
3	Anang Triono dan Bambang Gunawan	4.767	6.194	6.723	17.684 (23,41%)
4	HM.Zainuddin, dan Masrukin	477	410	749	1.636 (2,16%)
5	Heru Sunayanta, dan Sholih Mu'adi	6.575	4.257	6.009	16.841 (22,29%)
	Jumlah suara sah	26.254	22.214	27.055	75.523 (100%)
B	Jumlah tidak sah	893	640	995	2.53

Sumber: Data KPUD Kota Blitar

Sedangkan kapasitasnya di dalam organisasi kebanyakan sebagai anggota sebanyak 55,0% dan sebagai pengurus sebanyak 45,0%.

Faktor Pendorong Partisipasi Politik

Dampak Komunikasi Terhadap Partisipasi dalam Pilwali Blitar

a. Sosialisasi Pilwali Blitar

Penyelenggaraan pemilihan walikota Blitar menurut pendapat sebagian besar responden (80,7%) KPUD Kota Blitar telah melakukan sosialisasi dengan baik. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Kota Blitar termuat dalam agenda sosialisasi antara lain berupa pemasangan atribut sosialisasi (disiapkan enam macam sosialisasi), pertemuan dialogis dengan lembaga-lembaga, melalui *workshop* dengan tokoh masyarakat dan ormas (organisasi kemasyarakatan), sosialisasi melalui jalan sehat dengan melibatkan seluruh kandidat, dan sosialisasi di tingkat kecamatan hingga kelurahan (hasil wawancara dengan ketua KPUD Kota Blitar tgl.2 April 2010). Namun ada sebagian kecil yang memandang KPUD Kota Blitar belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan baik (6,0%) dan ada pula mereka yang tidak tahu menahu apakah sudah melakukan sosialisasi atau belum (13,3%).

Kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD

Kota Blitar cukup efektif untuk menggerakkan partisipasi rakyat dalam pemilihan Walikota Blitar. Hal ini didukung oleh pernyataan mereka bahwa mereka hadir dalam pemilihan walikota antara lain disebabkan oleh karena tertarik disosialisasikan oleh KPUD yang memberikan pencerahan kepada rakyat (70,0%). Tertarik pada komunikasi politik berarti KPUD telah berhasil mendorong rakyat untuk berpartisipasi pada pemilihan walikota, hal ini mungkin saja pesan-pesan yang disampaikan cukup meyakinkan pemilih, media komunikasi dalam hal ini media massa seperti televisi lokal (JTV, KSTV, dan Televisi Rajawali), Radio Mayangkara, Persada, Mahardika dan Radio Patria dan surat kabar Jawa Pos, Surya, Memorandum, Bhirawa dan Time Dor, serta media lainnya dipandang cukup efektif dalam mengemas pesan-pesan politiknya. (hasil wawancara dengan ketua KPUD Kota Blitar tgl.2 April 2010)

b. Penetrasi Media

Penetrasi media dimaksud adalah sejauhmana mereka terpengaruh oleh media tersebut dan sejauhmana rakyat mengetahui tentang penyelenggaraan pemilihan Walikota Blitar. Mereka tahu pemilihan walikota lewat televisi lokal, baik JTV, KSTV, dan Televisi

Rajawali. Tampilan kandidat di televisi seperti JTV, KSTV dan Rajawali kebanyakan dari mereka kadang-kadang melihatnya (49,3%) dan mereka memilih kandidat karena penampilan di media tersebut, ada pula mereka yang menyatakan seringkali melihatnya (39,3%) dan mereka menyatakan berpartisipasi dalam pemilihan walikota Blitar antara lain karena penampilan atau kampanye di media, namun ada pula mereka tidak pernah melihatnya. Kondisi seperti ini dapat disimpulkan bahwa media televisi masih efektif untuk memperkenalkan diri dan program-program kandidat. Selain itu komunikasi politik lewat media massa tersebut efektif untuk memengaruhi mereka untuk berpartisipasi politik dalam pemilihan Walikota Blitar atau paling tidak media tersebut memberi pendidikan politik tentang demokrasi terutama dalam kasus pemilihan Walikota Blitar.

Demikian pula media radio tampak efektif untuk memperkenalkan diri para kandidat dan program kampanyenya, hal ini terbukti sebanyak 58,0% menyatakan sering mendengarkan dan sebanyak 34,0% menyatakan kadang-kadang mendengarkan program kampanye para kandidat lewat Radio Mayangkara, Persada, Mahardika dan Radio Patria. Mereka sangat sedikit sekali yang menyatakan tidak pernah (4,7%) dan tidak tahu soal kampanye kandidat ataupun program-programnya. Mereka yang menyatakan sering mendengarkan kampanye lewat media radio dengan alasan karena mereka tertarik dengan program kampanye kandidat oleh karena itu mereka secara terus menerus berupaya ingin tahu program-program kandidat yang mereka tawarkan. Apabila dinilai cocok program-program yang ditawarkan akan menjadi pertimbangan untuk dipilih dalam pemilihan walikota.

Selain media radio efektif untuk memperkenalkan program dan kandidat juga efektif untuk memengaruhi rakyat untuk hadir dalam pemilihan Walikota Blitar. Hal itu diperkuat oleh pernyataan mereka bahwa kehadiran mereka di pilwali antara lain karena informasi dari media radio tersebut (71,0%). Surat Kabar seperti Jawa Pos, Surya, Memorandum, Bhirawa dan Time Dor juga

tampak efektif sebagai media kampanye kandidat. Hal ini terbukti hasil penelitian sebanyak 50,0% menyatakan sering menggunakan media tersebut dan sebanyak 32,7% menyatakan kadang-kadang menggunakan atau tahu kandidat lewat surat kabar. Ternyata media surat kabar relatif efektif untuk memengaruhi rakyat untuk berpartisipasi dalam pilwali antara lain disebabkan oleh pemberitaan media surat kabar tersebut (53,3%) yang secara terus menerus dilakukan.

Bahkan mereka banyak pula yang menggunakan media televisi dan radio, bahkan elektronika serta cetak. Hal ini terlihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang sering mengetahui kandidat lewat media televisi sebanyak 45,3% dan yang menyatakan kadang-kadang sebanyak 48,0%. Demikian pula elektronika dan cetak, mereka tahu kandidat dan program kampanye banyak pula yang lewat kedua media tersebut.

Kampanyenya lewat media *banner*, *leaflet*, spanduk dan baliho tampak lebih efektif. Hal ini terbukti mereka yang menyatakan seringkali melihat lewat media tersebut sebanyak 82,2%. Media kampanye berupa rapat umum masih diketahui atau masih diminati oleh pemilih yaitu sebanyak 38,0% menyatakan sering hadir/tahu, dan sebanyak 24,7% mereka menyatakan kadang-kadang hadir atau minimal tahu 24,7%. Mereka seringkali melihat kandidat lewat media *banner*, *leaflet*, spanduk dan baliho, namun tampaknya media tersebut masih efektif untuk memengaruhi mereka untuk hadir dalam pemilihan. Kondisi ini dapat dilihat mereka yang menyatakan terpengaruh oleh media sebanyak 59,6%.

Media massa baik itu televisi, radio, surat kabar, baliho, *leaflet*, dan lain sebagainya masih sangat efektif untuk memengaruhi kehadiran memilih pada pemilihan, hal tersebut didukung oleh alasan mereka hadir di pemilihan walikota karena penampilan di media massa (60,0%). Kemasan media dalam mengkampanyekan pemilihan walikota dapat dikatakan cukup berhasil untuk ikut menggerakkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan walikota Blitar.

Mereka yang menyatakan sering mendengarkan ataupun melihat kampanye lewat media massa mereka sebagian besar mempunyai alasan tertarik dengan program kampanye kandidat oleh karena itu mereka secara terus menerus berupaya ingin tahu program-program kandidat yang mereka tawarkan dan apabila dinilai cocok program-program yang ditawarkan akan menjadi salah satu pertimbangan untuk dipilih dalam pemilihan walikota.

c. Komunikasi Antarpribadi

Di Kota Blitar ternyata komunikasi antar pribadi atau dalam tulisan ini dapat disebut dialog politik sangat efektif untuk memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemilihan walikota., seperti teman dan tetangga. Kedua komunitas teman maupun tetangga ikut memberikan andil terhadap persoalan pemilihan walikota, hal ini terbukti sebanyak 47,3% menyatakan sering berdialog soal kandidat dan program kampanyenya, dan sebanyak 41,3% menyatakan kadang-kadang memperbincang-kannya. Demikian juga dengan tetangganya mereka sering memperbincangkan soal program kampanye kandidat (48,0%) dan mereka yang kadang-kadang memperbincang-kannya sebanyak 33,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi antarpribadi masih efektif baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk dijadikan sebagai sarana pendidikan politik maupun sosialisasi politik. Sedangkan untuk media lainnya seperti organisasi keagamaan, organisasi partai politik tampaknya masih kurang efektif untuk dijadikan sebagai media pengenalan, sosialisasi kandidat maupun program kampanyenya. Hanya saja perkumpulan warga setempat tampaknya masih dapat dipertimbangkan sebagai sarana untuk pengenalan ataupun sosialisasi pemilihan walikota.

Dari sisi dialog politik (komunikasi politik) yang efektif untuk berdiskusi soal pemilihan walikota Blitar adalah teman sekerjanya atau teman sekolahnya. Ada pula berdiskusi dengan tetangganya, saudaranya, atasan dalam bekerja, orang tua, bahkan dengan suami ataupun istrinya. Kondisi ini dapat dilihat mereka yang melakukan diskusi

politik soal pemilihan Walikota Blitar sebanyak 74,0% dan mereka yang tidak melakukan diskusi politik hanya sebanyak 26,0%. Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemilihan Walikota dipandang menarik untuk didiskusikan. Mereka sebagian besar mengadakan dialog politik dengan teman sekerja, atau teman sekolah memandang bahwa diskusi politik dengan teman sendiri lebih mendalam dan lebih intensif serta tidak ada batas-batas psikologis. Sedangkan materi yang mereka diskusikan adalah materi kampanye yang menyangkut persoalan pengangguran yang ada di wilayah Kota Blitar dari tahun ke tahun yang jumlahnya meningkat. Bahan diskusi lainnya adalah bagaimana kandidat dalam mengatasi pengangguran, kemiskinan. Selain persoalan korupsi, pendidikan juga dijadikan sebagai bahan diskusi mereka. Tidak kalah pentingnya adalah persoalan pertanian di Kota Blitar yang semakin hari semakin sempit lahan pertaniannya. Persoalan ekonomi dan kesehatan tidak lepas pula dijadikan bahan diskusi.

Dari hasil berbagai diskusi tersebut mereka mempunyai pendapat bahwa Walikota terpilih nantinya tidak yakin kalau dapat mengatasi soal pengangguran di Kota Blitar yang terjadi sekarang ini (81,3%). Mereka berpendapat bahwa tidak mudah walikota Blitar terpilih untuk menciptakan lapangan pekerjaan, apalagi Kota Blitar adalah kota kecil bukan kota industri. Namun hanya sedikit yang mempunyai keyakinan bahwa walikota terpilih dapat mengatasi persoalan pengangguran (18,7%). Tidak jauh berbeda dengan persoalan kemiskinan di Kota Blitar, mereka kebanyakan tidak yakin kalau walikota terpilih nanti dapat mengatasi persoalan kemiskinan (75,3%). Demikian pula mereka pesimis atau tidak yakin walikota terpilih dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada di Kota Blitar seperti persoalan korupsi di tubuh birokrasi (85,7%) dan persoalan ekonomi (76,7%) serta persoalan pertanian (73,4%). Persoalan yang mereka yakini dapat diatasi oleh walikota terpilih antara persoalan pendidikan (73,3%), dan terhadap persoalan kesehatan (70,0%). Mereka menganggap pendidikan di Kota

Tabel 2
Daya Tarik Penampilan Media

No	Penampilan media pengenalan yang menampilkan pemilihan walikota	F (%)				Jumlah
		Sm	M	Tm	Th	
1	Televisi:JTV,KSTV,Rajawali	16,7	53,3	20,0	10,0	100
2	Radio Mayangkara, Persada, Mahardika, Patria	14,7	66,7	15,3	3,3	100
3	Surat kabar:Jawa Pos, Surya, memorandum, Bhirawa,Time Dor	16,0	52,0	26,0	6,0	100
4	Media <i>banner</i> , <i>leaflet</i> ,spanduk,baliho	30,7	44,7	18,0	6,7	100
5	Kampanye rapat umum	22,7	32,0	24,7	20,7	100

Sumber: data primer diolah

Keterangan: Sm: Sangat menarik; M: Menarik; Tm: Tidak menarik; Th: Tidak tahu

Blitar selama ini tidak menjadi persoalan, demikian pula pelayanan di bidang kesehatan selama kepemimpinan walikota Drs. Djarot Syaiful Hidayat dinilai baik dan berpihak pada rakyat.

d. Marketing Politik: Penampilan Kandidat

Dari hasil penelitian penampilan kandidat di media televisi lokal seperti JTV, KSTV, Rajawali dalam menyampaikan program kampanye ada kecenderungan mayoritas menyatakan menarik (53,3%), dan mereka menyatakan sangat menarik sebanyak 16,7%. Kondisi ini membuktikan bahwa *marketing* politik yang ditampilkan di media massa televisi lokal berhasil menarik simpati masyarakat. Demikian juga media massa berupa radio seperti Radio Mayangkara, Persada, Mahardika dan Radio Patria *marketing* politiknya dipandang oleh sebagian besar pemilih menarik. Hal ini terbukti sebanyak 66,7% menyatakan penampilannya menarik, dan sebanyak 14,7% menyatakan sangat menarik.

Media lainnya berupa surat kabar seperti Jawa Pos (Radar Jawa Pos), Surya, memorandum, Bhirawa dan Time Dor dipandang oleh sebagian besar pemilih menarik. Kondisi ini terlihat bahwa mereka yang menyatakan penampilan di media menarik sebanyak 52,0%, dan mereka yang

menyatakan sangat menarik sebanyak 16,0%. Tidak itu saja penampilan kandidat dan program kampanye di media lainnya seperti *banner*, *leaflet*, spanduk, baliho ada kecenderungan pula menarik pemilih, hal ini terlihat secara kuantitatif yang menyatakan menarik sebanyak 44,7% dan sangat menarik sebanyak 30,7%. Sedangkan mereka yang menyatakan tidak menarik ataupun tidak tahu hanya sebagian kecil saja. Ada kenderungan pula penampilan kandidat ataupun dalam menyampaikan programnya di kampanye rapat umum menarik. Kondisi ini dapat dilihat bahwa secara kuantitatif sebagian besar yang menyatakan menarik sebanyak 32,0% sangat menarik sebanyak 22,7%. Hasil penelitian seperti ini menunjukkan bahwa *marketing* politik para kandidat pemilihan Walikota Blitar pada umumnya cukup baik dan menarik.

Budaya Politik

a. Keyakinan Dalam Memilih

Setiap orang dalam memilih kandidat politik tidak bisa lepas dari budaya politiknya yang mereka yakini selama ini. Mereka kebanyakan memandang bahwa persoalan memilih adalah sebagai kewajiban setiap warga negara (62,0%). Sedangkan mereka yang memandang memilih maupun tidak memilih merupakan hak setiap warga negara cenderung sedikit (29,3%). Bahkan mereka

Tabel 3
Dampak Pemilihan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

NO	Dampak Pilwali Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	F (%)
1	Akan menjadi sangat baik, memilih	10,7
2	Akan menjadi sangat baik, tidak memilih	0,0
3	Akan menjadi baik, memilih	52,0
4	Akan menjadi baik, memilih	52,0
5	Akan menjadi tidak baik, memilih	0,0
6	Akan menjadi tidak baik, tidak memilih	8,0
7	Akan menjadi sangat tidak baik, memilih	0,0
8	Akan menjadi sangat tidak baik, tidak memilih	0,0
9	Tidak tahu akan menjadi baik ataupun menjadi buruk, memilih	20,3
10	Tidak tahu akan menjadi baik ataupun menjadi buruk, tidak memilih	9,0
Jumlah		100

Sumber: data primer diolah

yang tidak tahu, persoalan memilih maupun tidak memilih merupakan kewajiban maupun hak setiap warga negara jumlah secara kuantitatif sedikit sekali (8,7%). Oleh karena mereka kebanyakan memandang persoalan memilih adalah sebagai kewajiban setiap warga negara hal ini menyebabkan partisipasi politik pada pemilihan walikota Blitar cukup tinggi.

Mereka memandang positif terhadap pemilihan walikota terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kota Blitar. Mereka kebanyakan memandang bahwa dampak pemilihan walikota terhadap penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi baik. Oleh karenanya dianggap berdampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kota Blitar maka berpengaruh terhadap kehadiran mereka dalam pemilihan pilwali tersebut (52,0%), bahkan ada yang meyakinkannya akan menjadi sangat baik, dengan sendirinya berkorelasi positif terhadap partisipasi mereka dalam pemilihan Walikota Blitar (10,7%). Namun demikian mereka ada yang meyakinkannya dampak ke depan terhadap penyelenggaraan pemerintahan belum tentu

akan menjadi baik, bahkan mereka ada yang tidak tahu menahu persoalan hasil pemilihan walikota apakah penyelenggaraan pemerintahan Kota Blitar menjadi baik ataupun menjadi buruk.

Di sisi lain yang perlu diketahui adalah bagaimana keyakinan mereka terhadap kesejahteraan rakyat pasca pemilihan Walikota Blitar? Tampak mereka belum yakin betul terhadap hasil pemilihan Walikota Blitar, mereka justru menyangsikan soal apakah pasca pemilihan nanti kesejahteraan rakyat semakin baik atau tidak. Hal ini terbukti hanya sedikit sekali yang menyakini bahwa walikota terpilih akan menyejahterakan rakyat sesuai janjinya pada saat kampanye (26,7%). Bahkan mereka sebanyak 30,7% tidak tahu persoalan itu, demikian pula mereka banyak pula yang meragukan apakah akan menyejahterakan atau tidak (29,3%), bahkan mereka ada pula yang meyakinkannya justru yang terjadi nanti walikota terpilih hanya berorientasi pada dirinya sendiri dan kelompoknya (8,7%). Ada pula mereka yang meyakini bahwa pasca pemilihan walikota terpilih tidak akan

menyejahterakan rakyatnya, dan akan mengingkari janji kampanyenya (4,7%). Bahkan mereka ada pula yang tidak dapat memrediksinya apakah walikota terpilih nanti dapat menepati janji kampanyenya atau tidak, bahkan mereka apatis atau tidak tahu menahu terhadap persoalan tersebut (30,7%).

b. Kepercayaan Pemilih Terhadap Penyelenggara Pemerintahan Kota

Ternyata ada korelasi positif antara tingkat partisipasi pada pilwali dengan kepercayaan pemilih pada penyelenggaraan pemerintahan kota. Hal ini terbukti banyak yang menilai bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kota Blitar pada lima tahun terakhir di bawah kepemimpinan Walikota Drs. Djarot Syaiful Hidayat (periode 2005-2010) sangat baik. Oleh karena penyelenggaraan pemerintahan dipandang baik, maka mereka yang mempunyai hak politik memilih kandidat tertentu (16,0%). Demikian pula

sebaliknya mereka yang memandang penyelenggaraan pemerintahan sangat baik tetapi tidak memilih pada pemilihan Walikota tidak kita temui sama sekali (0,0).

Kecenderungan yang sama bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kota Blitar dalam kurun waktu lima tahun terakhir dipandang baik, oleh karena itu sangat wajar mereka kemudian memilih, dalam pemilihan walikota (65,3%). Sedangkan mereka yang memandang penyelenggaraan pemerintahan Kota Blitar baik akan tetapi dalam pilwali tidak memilih, tidak ada (0,0%). Tidak itu saja ada kecenderungan bahwa responden yang menilai penyelenggaraan pemerintahan Kota Blitar semakin tidak baik, ataupun semakin buruk kemudian golput. Oleh karena itu tingkat kehadiran pemilih dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah akan banyak dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kepercayaan pemilih terhadap penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya.

Tabel 4
Kepercayaan Pemilih Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Penyelenggaraan secara umum pemerintahan Kota Blitar dalam 5 (lima) tahun terakhir	Frekuensi (%)
1	Sangat baik, memilih	16,0
2	Sangat baik, tetapi tidak memilih	0,0
3	Baik, memilih	66,0
4	Baik, tetapi tidak memilih	0,0
5	Kurang baik, memilih	12,0
6	Kurang baik, tidak memilih	0,0
7	Buruk, memilih	0,0
8	Buruk, tidak memilih	2,0
9	Sangat buruk, memilih	0,0
10	Sangat buruk, tidak memilih	4,0
Jumlah		100

Sumber: data primer diolah

Dengan demikian semakin banyak masyarakat yang memandang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan akan semakin memperkecil jumlah golput dan realitasnya pada pemilihan walikota Blitar jumlah golputnya relatif kecil hanya sekitar 30,0% saja.

Hasil penelitian ini mendukung analisis Siti Zohro, yang menyatakan bahwa relasi budaya lokal dengan demokrasi cukup menarik diamati di Kota Blitar. Meskipun kawasan tersebut berada dalam lanskap budaya mataram yang sering dianggap kurang demokratis, realitas politik menunjukkan bahwa Blitar berbeda dengan daerah lain di wilayah mataram. Baik level suprastruktur politik maupun infrastruktur politik di Blitar cenderung memiliki fenomena nilai-nilai demokrasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, misalnya, Pemerintah Kota Blitar telah melakukan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan melalui reformasi birokrasi (Siti Zuhro, 2009:45). Kondisi budaya lokal maupun birokrasi pemerintahan, paling tidak akan memengaruhi partisipasi politik pemilih dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah setempat.

Partisipasi politik juga dapat dipengaruhi oleh seberapa jauh tingkat kepatuhan mereka terhadap komisi pemilihan umum (KPUD) atas hasil pemilihan Walikota Blitar tahun 2010. Kepatuhan pemilih terhadap keputusan KPUD tinggi berdampak pada kemungkinan kehadiran pada pemilihan Walikota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan mereka terhadap keputusan KPUD cenderung tinggi. Mereka yang menyatakan mematuhi apa yang menjadi keputusan pemerintah ataupun keputusan KPUD dalam pemilihan Walikota Blitar (41,3%) dan mereka yang menyatakan tidak hanya sekedar mematuhi apa yang diputuskan oleh pemerintah, tetapi harus pula mengoreksi apa yang telah diputuskan (50,0%). Sedangkan mereka yang bersikap pasif tidak kita temui sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pemilih terhadap keputusan KPUD dapat dikatakan

cukup tinggi, hal ini berpengaruh terhadap kehadiran mereka dalam pemilihan Walikota dan tidak ada konflik politik pasca pemilihan walikota Blitar.

Faktor partisipasi mereka dalam pemilihan Walikota Blitar dapat dipengaruhi pula oleh kepercayaan mereka terhadap penyelenggaraan pemerintahan kota pasca pemilihan walikota. Kepercayaan yang cukup baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan kepemimpinan Djarot Syaiful Hidayat 2000-2010 (dua kali masa pemerintahan) berdampak terhadap tingkat partisipasi politik pada pemilihan walikota 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar memrediksikan hasil pemilihan walikota berdampak baik pasca pemilihan walikota (52,0%), bahkan ada yang percaya hasil pemilihan walikota Blitar akan berdampak sangat baik (10,7%). Mereka yang percaya penyelenggaraan pemerintahan pasca pemilihan walikota akan menjadi lebih baik, hal ini diyakini karena pengalaman masa lalu hasil pemilihan walikota yang dimenangkan oleh walikota terpilih yaitu Drs. Djarot Syaiful Hidayat semakin baik, pelayanan birokrasi maupun pelayanan publik yang lain seperti pelayanan Puskesmas yang cepat, ramah, dan murah. Bahkan ada salah satu Puskesmas Bendo di Kota Blitar menggunakan pelayanan melalui *citizen charter*. *Citizen charter* merupakan kontrak pelayanan atau kesepakatan antara pemberi layanan dengan pihak konsumen dan dalam memberikan layanan puskesmas mengutamakan komitmen bersama.

c. Kepercayaan Masyarakat Terhadap pelayanan publik

Demikian pula partisipasi politik dalam pemilihan Walikota Blitar dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan pemilih terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kota Blitar periode sebelumnya tahun 2005-2010 di bawah pimpinan Walikota Drs. Djarot Syaiful Hidayat terutama kualitas pelayanan publik. Dapat diduga bila tingkat kepercayaan masyarakat tinggi terhadap pelayanan birokrasi, tingkat partisipasinya juga tinggi.

Tabel 5
Kepercayaan Terhadap Kualitas Pelayanan Publik

No	Kepercayaan Pemilih Terhadap Kualitas Pelayanan Publik	F (%)
1	Sangat baik, memilih	23,3
2	Sangat baik, tidak memilih	0,0
3	Baik, memilih	52,0
4	Baik, tidak memilih	0,0
5	Kurang baik, memilih	14,7
6	Kurang baik, tidak memilih	0,0
7	Tidak baik, memilih	0,0
8	Tidak baik, tidak memilih	1,3
9	Sangat tidak baik, memilih	0,7
10	Sangat tidak baik, tidak memilih	0,0
11	Tidak tahu, memilih	8,0
12	Tidak tahu, tidak memilih	0,0
Jumlah		100

Sumber: data primer diolah

Mereka yang memilih kebanyakan percaya terhadap pelayanan publik baik seperti pelayanan kesehatan, pelayanan KTP (52,0%), bahkan ada pula sebagian yang menilai sangat baik (23,3%). Mereka juga banyak yang menyatakan bahwa kehadiran mereka pada pemilihan walikota karena dipengaruhi oleh citra pelayanan publik yang selama ini dinilai baik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kehadiran pemilih disebabkan oleh karena tingginya kepercayaan mereka terhadap pelayanan publik pada masa kepemimpinan Drs. Djarot Syaiful (2005-2010) dinilai cukup berhasil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi kepercayaan pemilih yang cukup baik terhadap birokrasi pemerintahan memberikan kontribusi yang besar terhadap tingkat kehadiran pada pemilihan Walikota Blitar.

KESIMPULAN

Faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi politik ada beberapa hal, antara lain: 1). faktor budaya politik partisipan, budaya politik partisipan tersebut disebabkan oleh karena kepercayaan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kota Blitar dipandang baik selama lima tahun terakhir terutama pada masa pemerintahan Drs. Djarot Syaiful Hidayat. 2). faktor kepercayaan yang cukup baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan juga faktor pelayanan publik yang selama ini dapat memberikan pelayanan yang baik dan dapat memberikan kepuasan pada rakyat. 3). faktor persepsi rakyat terhadap kondisi kebebasan berpolitik di Blitar saat ini ikut mewarnai partisipasi mereka pada pemilihan walikota Blitar.

Selain budaya politik partisipan cukup

tinggi pada pemilihan walikota Blitar disebabkan pula karena faktor strategi sosialisasi yang diterapkan oleh KPUD cukup efektif. Media televisi lokal (JTV, KSTV, dan Televisi Rajawali), Radio Mayangkara, Persada, Mahardika dan Radio Patria dan surat kabar Jawa Pos, Surya, Memorandum, Bhirawa dan Time Dor, serta media lainnya cukup efektif dalam mengemas pemilihan walikota Blitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Nimmo, Dan. 1989. *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- 1993.*Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung :Remaja Rosdakarya.
- R. Siti Zuhro, dkk. 2009. *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesenambungan*

Nilia-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali. Jakarta : Penerbit Ombak.

- Rakhmat, Jalaluddin. 1998. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sasa Djuarsa Sendjaja, dkk. 1996. *Materi Pokok Pengantar Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Surbakti, Ramelan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Widiasarana.

Sumber lainnya :

Surat Kabar :

- Surat Kabar Harian Kompas, 16 Pebruari 2008, Tulisan Yohan Wahyu tentang Partisipasi Politik Apatisme Publik Pengaruhi Pemilih